

BAB II

OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Politik di Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Kabupaten Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX (sumber : <https://www.bantulkab.go.id/profil/sejarah.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2016).

Pembentukan wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bentuk perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah

maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

1. Daftar Bupati yang Pernah Memimpin Kabupaten Bantul

Terlepas mengenai fakta sejarah atas terbentuknya Kabupaten Bantul, penting dalam penelitian ini untuk membahas mengenai fakta sejarah kedua, yaitu dalam hal masa kepemimpinan di Kabupaten Bantul. Membuka lembaran sejarah Bantul setelah Sri Sultan HB V mewisuda R.T. Mangku Negoro, yang pada intinya hampir sama dengan membuka perjalanan Bangsa Indonesia pada umumnya. Dari pemerintahan satu Bupati ke Bupati yang lain Bantul terus mengalami perkembangan dan dinamika. Adapun Bupati yang memimpin Kabupaten Bantul yaitu :

1. Raden Tumenggung Mangun Negoro 20 Juli 1831
2. Raden Tumenggung Jayadiningrat 1845 - 1851
3. Raden Tumenggung Tirtonegara 1851 - 1852
4. Raden Tumenggung Nitinegara 1852 - 1855
5. Raden Tumenggung Danukusuma 1855 - 1878
6. Raden Tumenggung Djojowinoto 1878 -
7. Raden Tumenggung Djojodipuro 1878 -
8. Raden Tumenggung Surjokusumo -
9. Raden Tumenggung Mangunyudo 1899 - 1913
10. K.R.T. Purbadiningrat 1913 - 1918
11. K.R.T. Dirdjokusumo 1918 – 1943
12. K.R.T. Djojodiningrat 1943 – 1947

13. K.R.T. Tirtadiningrat 1947 - 1951
14. K.R.T. Purwaningrat 1951 – 1955
15. K.R.T. Partaningrat 1955 - 1958
16. K.R.T. Wiraningrat 1958
17. K.R.T. Setyosudono 1958 – 1960
18. K.R.T. Sosrodiningrat 1960 – 1969
19. K.R.T. Prodjohardjono (Pejabat) 1969 – 1970
20. R. Sutomo Mangkusasmito, SH. 1970 – 1980
21. Suherman Partosaputro 1980 – 1985
22. K.R.T. Suryo Padmo Hadiningrat (Moerwanto Suprpto) 1986 – 1991
23. K.R.T. Yudadiningrat (Sri Roso Sudarmo) 1991 – 1998
24. Drs. H. Kismosukirdo (PJ) 1998 – 1999
25. Drs. HM. Idham Samawi 1999 – 2004
26. Drs. Mujono NA , Desember 2004 - Januari 2005 (ALM) (Penjabat)
27. Drs. HM. Idham Samawi 2005 - 2010 (Terpilih kembali melalui
PILKADA langsung 2005)
28. Hj. Sri Surya Widati 2010 – 2015
29. Harsono-Halim 2015-sekarang

2. Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul, dan Gambaran Singkat Permasalahan

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari empat kabupaten yang termasuk dalam wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan

dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun.

Luas Kabupaten Bantul 508,85 km² atau 15,9 % dari luas wilayah DIY, dengan jumlah penduduk sebesar 921.263 jiwa pada tahun 2011 (BPS Bantul 2011, 8). Secara administratif Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Bupati, dimana Bupati pertama adalah Raden Tumenggung Mangun Negoro yang memimpin semenjak 20 Juli 1831. Pasca reformasi atau tepatnya tahun 1999, Bantul memiliki Bupati baru yaitu Idham Samawi yang menjabat mulai tahun 1999 hingga 2004. Pada Desember 2004 hingga Januari 2005, jabatan bupati dipimpin oleh Drs.Mujono NA sebagai pelaksana tugas harian. Pada tahun 2005, terlaksana pilkada langsung pertama kali di Kabupaten Bantul dalam pilkada tersebut, Idham Samawi menjadi pemenang sehingga Ia kembali menjabat sebagai Bupati Bantul dari tahun 2005 hingga 2010. Pada tahun 2010, kembali dilaksanakan pilkada untuk memenuhi jabatan Bupati Bantul selanjutnya.

Pada pilkada tahun 2010 terdapat ada fenomena menarik, dimana salah satu calon Bupati adalah istri dari Idham Samawi yaitu Sri Surya Widati atau Ida Samawi. Pada pilkada Bantul tahun 2010 tersebut, terdapat tiga calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi Kardono-Ibnu Kadarmanto, Sri Surya Widati-Sumarnodan Sukardiyono-Darmawan. Pasangan Nomor urut pertama atau Kardono-Ibnu Kadarmanto merupakan calon independen, sedangkan pasangan Ida Samawi dan Sumarno diusung oleh PDIP, Golkar, PAN, dan PKB dan pasangan

Sukardiyono-Darmawan diusung oleh partai Demokrat dan PKS (Koran Kompas,2010).

PDIP memiliki alasan tersendiri untuk mengusung Ida Samawi sebagai calon kandidiat Bupati Bantul. Menurut salah satu kader DPP PDIP Kabupaten Bantul yaitu Bapak Arjun mengatakan bahwa aspirasi dari masyarakatlah yang menginginkan Ida Samawi melanjutkan kepemimpinan suaminya.

Berdasarkan rapat yang diselenggarakan secara demokratis dan terbuka, pada level paling bawah yaitu rapat ranting ditingkat desa, sebanyak 75 desa menginginkan bahwasannya Idha Samawi menjadi Bupati Bantul untuk periode 2010-2015. Rapat itu dilanjutkan ke tingkat kecamatan, dimana sebanyak 17 kecamatan juga menginginkan Idha Samawi maju menjadi Bupati Bantul. (Bapak Arjun, kader DPP PDIP Kab. Bantul, hasil wawancara 20 Desember 2016).

Sedangkan pada Rapat Kerja Cabang Khusus tingkat Kabupaten, diputuskan bahwa Sri Suryawidati menjadi calon kandidat yang akan maju dalam Pemilukada Kabupaten Bantul ditemani dengan Drs H Sumarno sebagai calon wakil Bupati Bantul. Di samping masyarakat menginginkannya, Ida Samawi juga telah mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. DPP sendiri mengusung Ida Samawi berdasarkan dinamika politik yang ada yaitu tuntutan masyarakat, survei internal partai dan visi misi Ida Samawi yang memang mengaspirasikan kepentingan masyarakat arus bawah, dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat Bantul menuju Bantul Projo Tamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis.

Pilkada Bantul dilaksanakan 23 Mei 2010, tiga bulan sebelum berhentinya masa kepemimpinan Bupati terdahulu. Pencalonan Ida Samawi ditengarai sebagai upaya pelanggengan dan pewarisan kepemimpinan dari Idham Samawi, meskipun

dari pihak internal calon meneriakan bahwa pencalonan Ida dikarenakan dukungan dari masyarakat Bantul. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bantul pada tahun 2010 tidak dilalui dengan mudah, dalam proses kampanye banyak sekali tindakan dari masing-masing calon yang dengan keras berusaha menarik perhatian pemilih. Namun apabila dicermati lebih lanjut terlihat bahwa hanya pasangan Sri Surya Widati-Sumarno dan Sukardiyono-Darmawan atau pasangan nomor urut dua dan tiga. Pasangan no urut satu atau Kardono-Ibnu Kadarmanto terlihat lebih pasif dan kurang gencar dalam proses kampanye.

Dalam hal pembiayaan kampanye, kubu Sri Surya Widati-Sumarno atau disingkat Idaman, menghabiskan biaya kampanye tertinggi yaitu senilai 1,2 Milyar, sedangkan pasangan Kardono-Ibnu Kadarmanto (Karib) sebesar Rp 13,7 juta dan pasangan Sukardiyono-Darmawan (Sukadarma) sebesar Rp 20,3 juta (Kompas, 2010).

Dalam proses kampanye ini dua kubu pasangan nomor urut dua dan tiga sangat aktif melakukan penyerangan dan saling sindir. Begitupula dalam debat yang dilaksanakan oleh KPUD, dimana kedua kubu ini saling menyerang satu sama lain. Terlepas dari pro kontra pewarisan kekuasaan klan Samawi, pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mengumumkan bahwa pasangan SriSurya Widati-Sumarno mendapatkan suara 67,77 persen dari total pemilih 691.982, sehingga otomatis menjadi pemenang dalam pilkada tersebut dengan suara terbanyak di kecamatan Sewon (36.919) dan terendah di kecamatan Piyungan (15.667), dimana sebagian besar pendukungnya (56%) adalah petani. Diurutan kedua adalah pasangan calon Sukardiyono-Darmawan Manaf yang

meraih 137.888 suara atau 28,26 persen. Sedangkan posisi terakhir ditempati Kardono-Ibnu Kadarmanto yang hanya meraih sebanyak 19.374 suara atau 3,97 persen dari suara keseluruhan (Tempo, 2010).

3. Dinasti Politik dalam Sejarah Pilkada Bantul

Politik dinasti menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Politik yang dikuasai beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Ditambah lagi dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan dinasti politik dalam pemerintah daerah yang mencul kepermukaan. Hal tersebut menimbulkan polemik disebagian masyarakat Indonesia. Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi melegalkan poltik dinasti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Sebagian pihak mempertanyakan keputusan tersebut. Seperti dijelaskan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) bahwa dengan adanya dinasti politik yang terjadi di daerah-daerah telah menyebabkan rusaknya tata kelola pemerintahan (sumber: <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/14/078835951/icw-sebut-dinasti-politik-merusak-tata-kelola-pemerintahan>, diakses pada tanggal, 1 Mei 2017).

Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan terdapat tiga jenis politik dinasti yang berkembang di Indonesia. Ketiganya, menurut Robert, berpotensi menimbulkan perilaku korupsi. Jenis dinasti politik pertama ialah regenerasi, politik lintas kamar atau cabang kekuasaan, dan dinasti politik lintas daerah. Banyak contoh yang dapat ditelisik mengenai kekuasaan dinasti politik dalam sebuah daerah, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Pilkada tahun 2015 memenangkan

Haryanti sebagai pemimpin daerah. Kemenangan Haryanti melanjutkan fase pemerintahan suaminya ditahun sebelumnya. Keluarga Haryanti berkuasa selama 15 tahun di Kabupaten Kediri. Sehingga politik dinasti sangat terlihat di sana.

Faktor partai juga punya andil besar dalam kemenangan Haryanti. Pasalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan mayoritas di Kabupaten Kediri. Saat ini politik dinasti sah-sah saja di negeri ini. Namun, menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia karena maraknya praktik korupsi dalam politik dinasti.

Sepanjang tahun 2016 telah terjadi 10 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Kasus yang saat ini ramai diperbincangkan adalah kasus Atty Suharti Tochija, Wali Kota Nonaktif Cimahi. Telah diketahui bersama bahwa Atty Suharti Tochija dan suaminya menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan pasar. Atty yang rencananya akan mencalonkan kembali pada pilkada serentak 2017 berhasil digagalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain terjadi di Kediri, dinasti politik juga terjadi Provinsi Banten. Dinasti politik yang terjadi di Provinsi Banten dikuasai oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah. Atut menjabat sebagai Bupati Banten selama 8 tahun, sepanjang ia menjabat tidak banyak perubahan yang terjadi di Banten, namun semakin menguatkan politik ekonomi dinasti politik Atut, dengan terlibatnya saudara-saudara Atut di dalam pemerintahannya.

Dipaparkan sebelumnya bahwa Ida Samawi yang merupakan istri dari mantan Bupati Bantul yang bernama Idham Samawi. Majunya Ida sebagai bupati Bantul dapat diamati sebagai proses pelanggaran dinasti politik yang dibangun

oleh keluarga Samawi. Klan Samawi merupakan salah satu klan yang berpengaruh dalam perpolitikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana kita tahu bahwa Samawi merupakan pendiri 'Kedaulatan Rakyat', yaitu sebuah koran lokal yang notabene menjadi konsumsi mayoritas warga di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Akibatnya media tersebut memiliki pengaruh dalam pembentukan opini publik terhadap sebuah fenomena. Tak ayal jika media massa dapat dimanfaatkan dalam kemenangan kandidat. Di samping merupakan pemilik koran terbesar di DIY-Jateng, nama 'Samawi' juga melekat pada anaknya yaitu Idham Samawi. Idham Samawi kini menjadi salah satu pimpinan dari Persiba Bantul. Persiba merupakan klub sepakbola yang mampu menyedot animo golongan muda di Bantul. Klub olahraga ini dinilai menjadi salah satu objek yang mendapat kucuran dana APBD yang banyak, dengan dalih sebagai sarana pengembangan olahraga.

Namun hal yang menarik pula adalah Persiba juga mampu menjadi daya tarik bagi pemilih pemuda. Hal ini disebabkan oleh kedekatan personal antara pemuda, Persiba, dan Idham sehingga para golongan muda menaruh legitimasi pada Idham Samawi, termasuk Ida 'Samawi'. Perilaku ini mengasumsikan bahwa seseorang akan berpartisipasi dalam pemilihan disebabkan oleh adanya dimensi psikologis yaitu faktor ketertarikan dengan politik, perasaan dekat dengan partai atau figur tertentu, mempunyai informasi untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti dan percaya bahwa keikut sertaannya akan bisa memperbaiki keadaan secara umum.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Desiana Rina Adninda dengan judul penelitian “Pelanggaran Dinasti Politik “Samawi” Sebuah Studi Perilaku Pemilih Model Psikologis dalam Pilkada Bantul 2010 mengatakan, terpilihnya Idham Samawi dalam pilkada Bantul 2010 tidak dapat dilepaskan dari dimensi psikologis para pemilihnya. Salah satu dimensi lain yang terlihat dari realitas ini adalah adanya keyakinan bahwa Ida mampu melanjutkan Program Kerja Bapak Idham Samawi. Sebagaimana kita tahu bahwa selama memimpin, Idham memiliki serangkaian kebijakan yang dinilai populis. Kebijakan-kebijakan ini telah membawa Kabupaten Bantul menjadi salah satu Kabupaten yang mendapatkan julukan *best practice* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinasti politik menutup peluang bagi munculnya proses-proses politik yang demokratis, terutama figur-figur alternatif yang mungkin lebih baik. Karena bagaimanapun kemudian dengan politik pewarisan secara biologis ini tentu akan menutup peluang kandidat lain walaupun memiliki kompetensi dan kualitas yang sangat baik untuk menjadi seorang pemimpin. Hal ini berarti, dinasti politik akan menjadi hambatan serius bagi terealisasinya hak-hak politik rakyat yang seharusnya memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan memanfaatkan jabatan politik.

Kedua, politik dinasti mengabaikan prinsip-prinsip pemilihan umum yang adil. Para kerabat yang menggantikan posisi *incumbent* sudah pasti akan mengambil manfaat, sekurang-kurangnya popularitas. Sebagaimana kita tahu bahwa Sri Suryawidati menggunakan nama ‘Idham Samawi’ agar setidaknya mirip dengan nama sang suami yang notabene menjabat bupati periode

sebelumnya. Di samping itu, ia juga menonjolkan nama 'Samawi' agar publik mengenalnya sebagai sosok yang dekat dengan Samawi. Pemanfaatan yang paling berbahaya terjadi jika otoritas dan fasilitas *incumbent* disalah gunakan secara maksimal untuk memenangkan para kerabat.

Ketiga, politik dinasti juga bisa merusak sistem kaderisasi partai politik. Penguatan institusionalisasi politik kepartaian menjadi terhambat karena peluang kader-kader terbaik partai diambil alih para kerabat yang baik dari segi kuantitas kaderisasi maupun kualitas sebenarnya bisa saja belum memenuhi persyaratan. Seperti halnya yang terjadi di Bantul, dimana Ida menggunakan nama 'Samawi' untuk mendulang suara. Inilah salah satu faktor yang membuat PDIP yakin untuk mengukung Ida, karena ia memiliki popularitas yang tinggi.

Keempat, dinasti politik dapat menyebabkan "tersetir"-nya kebijakan yang harus diambil pemerintah demi langgengnya kekuasaan satu-dua kelompok tertentu, dimana hal ini berdampak pada semakin tercermarnya proses demokrasi. Aktor politik dan kebijakan yang ada, sulit untuk dipastikan terbebas dari kepentingan sebagian golongan bahkan orang perorangan. Seperti halnya yang terjadi di Bantul, dimana kebijakan juga disetir oleh sang suami. Dapat dilihat bahwa terdapat alokasi anggaran yang besar untuk sektor sepakbola. Hal ini jelas merupakan program titipan sang suami, mengingat sang suami kini menjabat sebagai petinggi klub Persiba Bantul. *Kelima*, tradisi dinasti ini akan semakin membuka dan memperbesar "celah" bagi Korupsi-Kolusi-Nepotisme dan lebih jauh dinasti politik mampu mengubah tekstur demokrasi sedemikian rupa sehingga bukan lagi sebagai ruang kontestasi ide, gagasan, program dan ideologi,

melainkan pasar transaksi jual-beli kepentingan individu dan kelompok-kekerabatan (Adninda, 2015:28).

B. Kekuatan Harsono-Halim Sebagai Aktor Baru dalam Politik Kabupaten Bantul

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2015 sudah usai. Termasuk yang berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan penyoblosannya berlangsung 9 Desember 2015 lalu telah dilakukan di tiga wilayah kabupaten yaitu di Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul. Sejak hari pertama proses penghitungan suara pemilih hingga penetapan pemenang oleh masing-masing Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat per-tanggal 21 Desember 2015 dapat dirangkum hasilnya sebagai berikut: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menetapkan calon *incumbent*, Sri Purnomo dan wakilnya Sri Muslimatun sebagai pemenang Pemilukada 2015. Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon (paslon) terpilih di Aula Monumen Jogja Kembali, Senin 21 Desember 2015. Paslon Sri Purnomo – Sri Muslimatun unggul dengan memperoleh 297.267 suara, sedangkan paslon Yuni Satia Rahayu – Danang Wicaksana mendapatkan 227.633 suara. Di Kabupaten Gunungkidul, Badingah (*incumbent*) dan Immawan Wahyudi sebagai paslon terpilih meraih sebanyak 167.915 suara mengungguli tiga paslon lainnya yaitu Djangkung - Endah yang meraih 104.440 suara, Benyamin – Mustangid dengan perolehan 98.379 suara, dan paslon Subardi – Wahyu yang meraih 54.076 suara.

Sedangkan Pemilukada Kabupaten Bantul, calon *incumbent* Sri Surya Widati berpasangan dengan Misbakhul Munir harus mengakui keunggulan paslon

nomer urut satu yaitu Suharsono – Abdul Halim Muslih yang diusung Partai Gerindra, PKB, memperoleh 261.667 suara atau 52,80 persen. *Incumbent* yang diusung PDIP dan Nasdem serta didukung sejumlah elit parpol lokal dalam hal ini hanya mendapatkan dukungan 233.667 suara atau 47,20 persen. Penetapan tersebut dilakukan setelah KPU Bantul melakukan penghitungan suara, dan setelah batas waktu yang ditentukan paslon yang kalah tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat, Harian Bernas, 22 Desember 2015). Suharsono – Halim, Mengejutkan Perhelatan politik dalam proses menapak denyut demokrasi di daerah seperti dipaparkan di atas sesungguhnya merupakan bagian dari gambaran kehidupan politik lokal dengan kekhasannya masing-masing.

Bahkan dalam pemilukada kali ini banyak hal yang menarik sekaligus pantas dicermati sehingga perjalanan politik dari masa ke masa cukup mengalami perkembangan yang dinamis. Dalam catatan sejarah politik, pada umumnya calon *incumbent* (petahana) memiliki peluang lebih besar untuk memenangi ‘perebutan kekuasaan’ karena dari segi pengalaman, kesiapan perencanaan dan fasilitas penunjangnya lebih mapan dibanding calon atau kandidat yang baru muncul di kancah dunia perpolitikan. Hal demikian terbukti bahwa di beberapa tempat yang melangsungkan pemilukada, serentak 2015 kebanyakan dimenangi paslon *incumbent*.

Seperti yang terjadi di DIY, di kabupaten Sleman dan Gunungkidul – *incumbent* melenggang sukses mendulang suara pemilih, sehingga tak kehilangan kekuasaan yang pernah diraihinya. Namun kelaziman ini terpatahkan dengan

hadirnya ‘pendatang baru’ dalam pertarungan perebutan kekuasaan di pemilukada Bantul. Suharsono – Abdul Halim Muslih, yang pada awal perjalanannya mengalami liku-liku jalan terjal sejak penjaringan melalui kendaraan politik, pendaftaran hingga penetapan untuk maju sebagai kandidat akhirnya menuai sukses, bahkan banyak pihak terdecak kagum melihat strategi maupun taktik sekaligus praktik politik yang diterapkan.

Sehari usai pemungutan suara, pemberitaan media cetak di antaranya menyebutkan: “Harsono – Halim secara mengejutkan mampu merebut kepemimpinan Kabupaten Bantul dari pasangan petahana Sri Surya Widati dan Misbakhul Munir” (Tribun Jogja, 10/12). Senada diberitakan bahwa ‘hasil cukup mengejutkan terjadi di Bantul. Sri Surya Widati (Ida), petahana Bupati Bantul, tumbang. Pasangan Suharsono – Abdul Halim Muslih memenangi pemilihan.

Hasil ini cukup di luar dugaan karena saat proses pencalonan sempat muncul wacana calon tunggal mengingat kekuatan dan kekuasaan Ida di Bantul, bahkan Suharsono –Halim sempat diremehkan dan dituding sebagai calon boneka. Sementara aspirasi yang terus berkembang di tingkatan akar rumput masing-masing parpol pendukung *incumbent* kurang mendapat respons atau kurang terakomodasi.

Pada bagian lain, kehidupan sosial dan politik di Bantul yang terus berkembang sejalan dengan tumbuhnya aspirasi rakyat kurang mendapatkan perhatian serius, sehingga calon *incumbent* Ida – Munir hanya mengandalkan jaringan dengan parpol-parpol yang menguasai kursi dewan (DPRD) sebagai sumberdaya politik yang dianggap kuat, bahkan cenderung mengandalkan

jaringan birokrasi serta dukungan mesin politik dari partai pengusung/pendukung (PDIP, Nasdem, Golkar, PPP, maupun ormas-ormas serta berbagai komunitas yang menyatakan diri sebagai simpatisannya). Itu semua kurang berjalan efektif mengingat mesin politik hanya bersifat temporer, sebatas bergerak di permukaan.

Marketing Politik dan Relawan Perubahan Kondisi riil untuk memenuhi kepentingan rakyat Bantul yang terus berjalan seiring berkembangnya aspirasi dari waktu ke waktu agaknya mendapat perhatian serius Suharsono sebagai kandidat yang siap bertarung dalam pemilukada Bantul. Tim relawan yang dibentuk mampu memetakan dan merumuskan persoalan dalam lingkup Bantul untuk segera dicari jawabnya. Persoalan biaya pendidikan, kesehatan yang masih memperhatikan dan membebani masyarakat, kurang optimalnya capaian kesejahteraan masyarakat ditandai ketidakmerataan bantuan/perlindungan bagi wong cilik, serta berbagai persoalan yang sempat bersentuhan dengan hukum, terutama berkaitan dengan *clean goverment maupun good govermance* telah menjadikan rangkuman isu kampanye secara berkelanjutan.

Tuntutan berbagai persoalan yang sering dikumandangkan oleh banyak kalangan terutama para penggiat LSM Bantul tersebut juga menginspirasi kubu Suharsono untuk mengemasnya ke dalam sebuah *marketing* politik, dengan bidikan pasarnya kalangan kawula muda di Kabupaten Bantul. Tak heran bilamana penguasaan psikologi politik massa menjadikan bekal untuk melakukan pendekatan terhadap generasi muda, terlepas dari sekat-sekat partisan politik tertentu. Kecerdasan dalam membidik simpatisan dibarengi data terkini dan

kondisi nyata di lapangan telah membuahkan hasil berupa membanjirnya dukungan yang terus mengalir secara simultan.

Walaupun Suharsono – Halim ini tidak memiliki Tim Sukses, hanya membentuk Tim Relawan, namun para pekerjanya bisa bersinergi dan bekerjasama untuk mencapai visi: ‘Terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kekompakan Tim Relawan Suharsono – Halim yang terbagi dalam beberapa level menunjukkan pula bahwa mekanisme kerja tim cukup solid dan proporsional. Di level pertama, ada tim kerja intelektual, level kedua adalah tim kerja organisasi atau ketatausahaan, di level ketiga yaitu mereka yang bekerja di lapangan.